



Subag Humas dan TU  
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

MEDIA
MERCUSUAR

Tanggal :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

									<input checked="" type="checkbox"/>						
Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut		

Sekcab : kita tunggu laporan audit BPK

<p>POSO, MERCUSUAR</p> <p>- Banyak pihak pesimis jika Pemerintah Kabupaten Poso mampu meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangan tahun 2016 dari BPK RI. Bukan hanya tidak mampu meraih predikat terbaik itu, mempertahankan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebagaimana diraih tahun lalu juga dinilai sulit.</p> <p>Keraguan itu tidak lepas dari kondisi keuangan Pemkab Poso saat ini yang belum mampu melunasi semua kewajiban mereka ke pihak ketiga dan pembayaran ke SKPD. Akibat itu pula mencuat isu dugaan kebocoran anggaran.</p> <p>Menjawab berbagai informasi yang berseliweran itu, Sekretaris Kabupaten (Sekcab) Poso, Siu Songgo meminta semua pihak tidak berspekulasi.</p> <p>"Mengenai adanya isu kebocoran anggaran itu kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari BPK," katanya kepada sejumlah wartawan baru-baru ini.</p> <p>Dikatakan Siu, pemeriksa dari BPK akan memeriksa setiap penggunaan keuangan</p>	<p>secara rinci sehingga jika ada penyelewengan sedikit saja akan mudah ditemukan.</p> <p>Kondisi keuangan daerah yang terjadi saat ini menurutnya juga disumbang oleh tidak tercapainya semua target pendapatan dalam APBD 2016, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan bagi hasil dari provinsi dan pusat. Ada konsekuensi dari kegagalan pencapaian asumsi penerimaan itu, yakni pada pembiayaan yang sudah diprogramkan masuk dalam pengeluaran. Atas kondisi saat ini, Sekcab mengatakan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperketat pengelolaan keuangan dimasa mendatang.</p> <p>Auditor BPK sendiri akan mulai bekerja pada bulan Januari ini dengan melakukan pemeriksaan di semua SKPD.</p> <p>Pada tahun lalu, dalam laporannya BPK menemukan beberapa persoalan pada pengelolaan keuangan di RSUD Poso dan masalah aset pemda yang belum kunjung tunas meski BPK sudah memberikan rekomendasi dari tahun sebelumnya.</p>
---	---